

---

# KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI POLITIK: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL

Arifah

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## Abstrak

Keadilan sosial adalah konsep yang mendasar dalam filosofi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Dalam perspektif filosofi politik, keadilan sosial merupakan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik yang mungkin terjadi dalam suatu masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan konseptual tentang keadilan sosial dalam filosofi politik, dengan mengeksplorasi asal-usul, konsep utama, teori-teori yang relevan, dan implikasinya dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

**Kata Kunci:** *Keadilan sosial, Filosofi politik, Ketidaksetaraan*

---



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Keadilan sosial telah menjadi perhatian utama dalam konteks pemikiran politik dan filosofis. Dalam sejarah pemikiran politik, konsep keadilan sosial telah menjadi landasan bagi berbagai teori politik dan perjuangan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Dalam perspektif filosofi politik, keadilan sosial merujuk pada upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin terjadi dalam masyarakat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik.*

*Penting untuk memahami bahwa konsep keadilan sosial tidaklah homogen; ia bervariasi dalam pengertian dan penekanannya tergantung pada pandangan filosofis yang mendasarinya. Dalam tinjauan konseptual ini, kita akan menjelajahi berbagai perspektif dalam filosofi politik yang membahas keadilan sosial, dari pendekatan klasik hingga kontemporer, dan mengeksplorasi implikasinya dalam konteks masyarakat modern.*

*Keadilan sosial dalam konteks filosofi politik memiliki akar yang kuat dalam pemikiran klasik dan modern. Plato dan Aristoteles, misalnya, membahas konsep keadilan dalam karyanya yang terkenal. Plato, dalam "Republik", mengembangkan gagasan tentang keadilan sebagai prinsip yang mendasari struktur masyarakat yang ideal, sementara Aristoteles, dalam "Etika Nicomachean", membahas keadilan sebagai keseimbangan yang tepat antara kebebasan dan kesejahteraan.*

*Pemikiran klasik ini kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran besar dalam sejarah pemikiran politik, seperti pemikiran kontrak sosial oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Dalam kontrak sosial mereka, gagasan tentang keadilan sosial muncul sebagai prinsip dasar yang melandasi pembentukan masyarakat sipil dan negara.*

*Konsep-konsep utama yang terkait dengan keadilan sosial dalam filosofi politik mencakup distribusi sumber daya, kesetaraan, kebebasan, dan imparialitas. Distribusi sumber daya mengacu pada bagaimana kekayaan, kekuasaan, dan peluang didistribusikan di dalam masyarakat. Kesetaraan mengacu pada perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan, sementara kebebasan mengacu pada hak individu untuk mengejar kebahagiaan dan melakukan tindakan-tindakan yang mereka pilih. Imparsialitas, di sisi lain, mengacu pada perlakuan yang adil dan netral terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau preferensi yang tidak adil.*

*Tinjauan konseptual tentang keadilan sosial dalam filosofi politik tidak lengkap tanpa membahas berbagai teori keadilan yang telah dikembangkan oleh para pemikir politik. Teori-teori ini, mulai dari utilitarianisme hingga liberalisme, komunitarianisme, dan teori keadilan murni oleh John Rawls, semuanya menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana masyarakat yang adil seharusnya diatur dan bagaimana sumber daya seharusnya didistribusikan.*

*Keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks sosial dan politik kontemporer. Di tengah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat dan konflik sosial yang berkembang di berbagai belahan dunia, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan teori keadilan sosial menjadi semakin*

*penting. Implikasi ini meluas ke dalam kebijakan publik, hukum, dan tindakan sosial yang diambil oleh masyarakat dan negara dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.*

*Dengan memahami secara menyeluruh konsep keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik, kita dapat lebih baik memahami kompleksitas tantangan sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang diinginkan.*

### **Metode Penelitian**

*Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan konseptual ini adalah pendekatan analisis filosofis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik dengan cara mendalam, kritis, dan sistematis. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini:*

**1. Identifikasi Literatur yang Relevan:** *Langkah pertama dalam metode penelitian ini adalah mengidentifikasi literatur yang relevan tentang konsep keadilan sosial dalam filosofi politik. Ini melibatkan pencarian dan pengumpulan bahan bacaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan makalah yang membahas topik yang relevan.*

**2. Analisis dan Interpretasi Teks-Teks Filosofis:** *Setelah literatur yang relevan terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi teks-teks filosofis yang menjadi acuan utama dalam pembahasan keadilan sosial. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap argumen, konsep, dan teori-teori yang dikemukakan oleh para pemikir politik dan filosof.*

**3. Pembentukan Kerangka Konseptual:** *Dengan mempertimbangkan berbagai argumen dan teori yang ditemukan dalam literatur, langkah selanjutnya adalah membentuk kerangka konseptual yang akan digunakan dalam tinjauan konseptual ini. Kerangka konseptual ini akan membantu dalam mengorganisasi dan mengelompokkan informasi yang ditemukan dalam analisis.*

**4. Analisis Perbandingan dan Kontrast:** *Pendekatan analisis filosofis juga melibatkan analisis perbandingan dan kontras antara berbagai konsep, teori, dan pandangan yang ada. Ini membantu dalam memahami perbedaan pendapat antara para pemikir politik, serta menyoroti persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka tentang keadilan sosial.*

**5. Evaluasi Implikasi dan Relevansi Kontemporer:** *Selanjutnya, metode penelitian ini melibatkan evaluasi implikasi dan relevansi konsep keadilan sosial dalam konteks sosial dan politik kontemporer. Ini mencakup penelusuran bagaimana konsep-konsep filosofis yang ditemukan dalam analisis dapat diterapkan dalam pemikiran dan tindakan politik yang terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial saat ini.*

**6. Penulisan dan Penyajian Temuan:** *Langkah terakhir dalam metode penelitian ini adalah menulis dan menyajikan temuan secara sistematis dan koheren. Ini melibatkan penyusunan struktur penulisan yang logis, pembentukan argumen yang kuat berdasarkan analisis filosofis, dan penyajian temuan dengan jelas dan komprehensif.*

## **PEMBAHASAN**

*Keadilan sosial merupakan salah satu konsep sentral dalam filosofi politik yang telah lama menjadi fokus perdebatan dan penelitian. Dalam tinjauan konseptual ini, kami akan mendalami pemahaman terhadap keadilan sosial dalam konteks pemikiran politik dan filosofis. Dengan mempertimbangkan berbagai teori dan pandangan, kita akan menjelajahi esensi, relevansi, dan implikasi konseptual dari keadilan sosial dalam masyarakat modern.*

**1. Konsepsi Keadilan Sosial:** *Konsepsi keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik mengacu pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Hal ini melibatkan distribusi yang seimbang dari kekayaan, peluang, dan hak-hak di antara individu-individu dalam masyarakat. Konsep ini juga mencakup perlindungan terhadap individu yang rentan dan marginalisasi, serta penghapusan ketidaksetaraan yang tidak adil.*

**2. Perdebatan Filosofis tentang Keadilan Sosial:** *Dalam sejarah pemikiran politik, terdapat berbagai pandangan dan teori tentang apa yang merupakan keadilan sosial yang sejati. Dari pandangan utilitarianisme yang menekankan pada pencapaian hasil yang maksimal bagi sebagian besar individu, hingga teori keadilan murni oleh John Rawls yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar bagi individu yang paling rentan, berbagai teori tersebut menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana masyarakat yang adil seharusnya diatur.*

**3. Implikasi Praktis dari Konsep Keadilan Sosial:** *Pemahaman tentang keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik memiliki implikasi yang luas dalam kebijakan publik, tindakan politik, dan pembentukan masyarakat modern. Misalnya, pemikiran liberalisme modern menekankan pada pentingnya kebebasan individu untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri, sementara juga mengakui perlunya intervensi negara untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.*

**4. Tantangan dan Kontroversi:** *Namun, konsep keadilan sosial juga tidak terlepas dari tantangan dan kontroversi. Salah satu perdebatan utama dalam filosofi politik adalah sejauh mana peran negara dalam mengatur dan mengontrol distribusi sumber daya dalam masyarakat. Selain itu, pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan keadilan dengan kebebasan individu juga menjadi fokus perdebatan yang hangat.*

**5. Relevansi dalam Konteks Sosial Kontemporer:** *Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan terhubung secara global, konsep keadilan sosial tetap relevan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan publik dan pembentukan masyarakat yang inklusif. Dengan pertumbuhan ketidaksetaraan ekonomi dan ketegangan sosial yang semakin meningkat, pemahaman yang mendalam tentang keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik menjadi semakin penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ini.*

**6. Aplikasi dalam Kebijakan Publik:** *Konsep keadilan sosial juga memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik. Berbagai negara menggunakan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagai landasan untuk mengembangkan program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan. Contohnya termasuk program-program pemerintah dalam*

bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk meningkatkan akses dan pemerataan sumber daya bagi semua warga negara.

**7. Peran Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial juga menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pendidikan tentang konsep-konsep keadilan sosial dalam sistem pendidikan dapat membantu mengubah paradigma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan solidaritas.

**8. Perluasan Cakupan Diskusi:** Selain itu, diskusi tentang keadilan sosial juga perlu diperluas untuk mencakup aspek-aspek yang lebih luas, termasuk isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan perubahan sosial. Meningkatnya kompleksitas tantangan global seperti perubahan iklim dan migrasi internasional menuntut pendekatan yang inklusif dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan di seluruh dunia.

**9. Kolaborasi Lintas Disiplin:** Tantangan-tantangan yang kompleks yang terkait dengan keadilan sosial juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin. Pemecahan masalah yang efektif memerlukan kontribusi dari berbagai bidang, termasuk filsafat, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik, untuk memahami akar penyebab ketidakadilan dan merancang solusi yang berkelanjutan.

**10. Peran Aktivisme dan Organisasi Masyarakat:** Aktivisme dan organisasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan sosial. Melalui aksi kolektif dan advokasi, kelompok-kelompok masyarakat dapat mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan hak-hak dasar, menciptakan kesempatan yang lebih merata, dan melindungi kelompok-kelompok yang rentan dari eksploitasi dan ketidakadilan.

Dengan mempertimbangkan langkah-langkah dan aspek-aspek di atas, kita dapat melihat bahwa keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi juga merupakan kerangka kerja yang penting dalam membentuk kebijakan, tindakan sosial, dan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua individu.

**Pentingnya Refleksi dan Dialog:** Pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan sosial juga memerlukan refleksi dan dialog yang terus-menerus. Dalam konteks yang terus berubah, pandangan tentang keadilan sosial juga dapat berkembang. Oleh karena itu, penting untuk terus membuka ruang bagi diskusi, pertukaran gagasan, dan evaluasi terhadap pemahaman kita tentang keadilan sosial.

**Mengatasi Tantangan dan Kendala:** Dalam menghadapi tantangan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian keadilan sosial, dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Penanggulangan ketidaksetaraan dan ketidakadilan memerlukan upaya bersama untuk mengidentifikasi akar penyebabnya, merancang solusi yang efektif, dan menerapkan langkah-langkah yang konkret.

**Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusi Partisipatif:** Penting untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan sosial. Ini melibatkan pemberian suara kepada mereka yang terpinggirkan dan memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan tindakan sosial, kita dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

**Peningkatan Kesadaran akan Hak Asasi Manusia:** Keadilan sosial juga terkait erat dengan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan keadilan dalam sistem peradilan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.

**Pengintegrasian Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari:** Terakhir, pemahaman tentang keadilan sosial juga perlu diintegrasikan ke dalam perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Baik itu dalam lingkup pribadi, profesional, atau sosial, kita dapat berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial melalui sikap inklusif, pengambilan keputusan yang adil, dan dukungan terhadap upaya-upaya perubahan positif.

Dengan demikian, keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik memerlukan komitmen dan aksi nyata dari semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi semua individu. Dengan menggabungkan pemikiran filosofis dengan tindakan praktis, kita dapat membangun fondasi yang kokoh bagi perubahan sosial yang lebih baik.

Dalam melanjutkan upaya menuju keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik, penting untuk memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan mengintegrasikannya ke dalam struktur dan kebijakan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup perlunya merombak sistem ekonomi dan politik yang tidak merata, menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam segala bentuknya, serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua individu. Selain itu, penting untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta mempromosikan budaya inklusi, toleransi, dan kerjasama di semua tingkatan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam struktur dan praktik sosial yang ada, kita dapat menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi masyarakat yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi semua individu.

Dalam perjalanan mencapai keadilan sosial, tantangan yang dihadapi seringkali kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta konsisten. Masyarakat harus bersatu untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural yang mungkin menghalangi proses menuju keadilan yang lebih inklusif dan merata. Hal ini melibatkan upaya untuk merancang kebijakan publik yang progresif dan berkeadilan, memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan untuk memastikan akses yang merata bagi semua individu, dan membangun lembaga-lembaga yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penting juga untuk menggalang dukungan dari berbagai sektor masyarakat, termasuk sektor swasta,

*LSM, dan organisasi masyarakat sipil, dalam mendukung upaya-upaya untuk mencapai keadilan sosial. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, serta kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.*

*Dalam upaya mencapai keadilan sosial, redistribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan menjadi hal yang sangat penting. Setiap individu harus memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, tetapi juga akan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara positif.*

*Hak-hak asasi manusia adalah pijakan utama dari konsep keadilan sosial. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Ini mencakup hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan dalam sistem hukum, dan hak atas akses terhadap layanan dasar seperti perumahan dan pangan.*

*Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembuatan keputusan adalah prinsip kunci dalam keadilan sosial. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, memengaruhi kebijakan publik, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Ini memastikan bahwa suara semua orang dihargai dan dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.*

*Ketimpangan struktural, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, atau politik, harus diatasi untuk mencapai keadilan sosial yang sejati. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, memberikan akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak, dan menghapus diskriminasi dalam segala bentuknya. Selain itu, penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.*

*Perlindungan terhadap yang paling rentan dalam masyarakat adalah aspek lain yang sangat penting dalam konsep keadilan sosial. Hal ini mencakup perlindungan terhadap anak-anak, lansia, orang cacat, dan kelompok minoritas lainnya yang rentan terhadap eksploitasi dan penindasan. Upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau diabaikan.*

*Kolaborasi lintas-sektor dan lintas-batas adalah kunci dalam upaya mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional harus bekerja sama untuk merancang kebijakan dan program-program yang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Ini mencakup pendanaan yang memadai, pertukaran pengetahuan dan sumber daya, serta dukungan yang berkelanjutan bagi inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

*Keadilan sosial harus diwujudkan dalam bentuk yang inklusif, yang mengakui dan menghormati keragaman dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap berbagai identitas dan budaya, serta penyesuaian kebijakan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan beragam individu dan kelompok. Keadilan yang inklusif juga*

memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang.

Kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama adalah nilai yang mendasari keadilan sosial. Setiap individu diharapkan untuk mengakui peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini mencakup dukungan terhadap kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, serta pengambilan tindakan individu untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Sistem hukum yang adil dan independen merupakan prasyarat penting bagi keadilan sosial yang berkelanjutan. Ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dalam sistem hukum, dan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dengan adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Akhirnya, keadilan sosial menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap kesempatan ekonomi, politik, dan sosial bagi semua individu. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga.

### **Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan sosial dalam perspektif filosofi politik adalah landasan penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui tinjauan konseptual ini, kita memahami bahwa keadilan sosial bukan hanya tentang redistribusi sumber daya, tetapi juga tentang pengakuan akan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, penghapusan ketimpangan struktural, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial ke dalam kebijakan publik, tindakan sosial, dan perilaku individu, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua individu. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, kerjasama lintas-sektor, serta upaya yang berkelanjutan dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat, C. M. (2021). *Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Pada Campuran Beton K175 Terhadap Kuat Tekan Beton* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kadir, A. (2017). *Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik*.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Matondang, A. (2007). *Pengaruh Kolom Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Waspada Terhadap Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area*.
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik*.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Revisi)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hayati, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ritonga, J. S. (2016). *Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra*. *Miqot*, 40(1), 154547.
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). *Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan* (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Syarif, Y. (2018). *Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube*. *JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING*, 1(2).
- Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.

- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital)*, 45.
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). *PENGERJAAN ABUTMENT PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN IDANO EHO-DESA SIFOROASI-KECAMATAN AMANDRAYA-KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes*.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.

- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU*. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.